

Pemerintah Siapkan Uang Sewa dan Bantuan Perbaikan Rumah



Sumber gambar : <https://www.prokal.co/advertorial/1773791128/pemerintah-siapkan-uang-sewa-dan-bantuan-perbaikan-rumah>

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan memastikan korban pergerakan tanah di Perumahan Polda, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara akan mendapatkan bantuan uang sewa.

Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan Zulifli mengatakan pemberian bantuan ini diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah dan mesti tinggal di tenda pengungsian.

"Tadi ada 5 KK yang tinggal di pengungsian, mereka akan menjadi prioritas karena rumahnya rusak berat," kata Zulkifli selepas mengunjungi lokasi bencana, Jum'at (6/1) siang.

5 KK tersebut nantinya akan mendapat bantuan sebesar Rp 750 ribu per bulan untuk uang sewa. Tak hanya itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga akan memasukan mereka yang rumahnya rusak berat dalam program perbaikan rumah karena bencana.

"Nanti akan diusulkan sebagai penerima bantuan karena memang mereka korban bencana, besarnya Rp 25 juta maksimal," jelas Zulkifli.

Selain pemberian bantuan uang sewa, Pemkot Balikpapan juga akan fokus pada perbaikan jalan yang rusak akibat pergerakan tanah. "Nanti jalan akan secepatnya diperbaiki supaya warga punya akses untuk memperbaiki rumah yang rusak ringan," kata Zulkifli.

Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, Zul menyarankan untuk tidak ditempati lagi dengan alasan faktor keamanan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balikpapan Usman Ali mengatakan pergerakan tanah di RT 37 masih terus terjadi hingga saat ini.

Dari data yang dihimpun BPBD, sejauh ini masih terdata 12 rumah yang mengalami kerusakan. Dimana, 5 diantaranya mengalami kerusakan yang cukup berat hingga tak bisa lagi ditempati. Dengan kondisi tanah yang masih bergerak, Usman khawatir rumah terdampak akan semakin bertambah.

"Kemungkinan bisa bertambah. Sebab saat ini tanah masih terus bergerak. Tadi malam itu yang tadinya penurunan sekitar 10 - 15 cm, sekarang sudah 40 cm. Makin turun tanah," ujar Usman.

BPBD, kata Usman sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan bantuan terhadap korban terdampak tanah bergerak.

"Masyarakat yang terdampak ini akan diberikan bantuan uang sewa dulu, untuk yang parah dulu ini ada 6 KK karena mereka sekarang tinggal di tenda pengungsian," ungkap Usman.

Usman juga mengimbau kepada warga di sekitar lokasi tanah bergerak terutama warga yang rumah terdampak dan masih memilih bertahan untuk tetap waspada. Terutama saat hujan deras turun yang dikhawatirkan membuat pergerakan tanah semakin signifikan.

"Bila retaknya melebar segera keluar dan membawa keluarganya keluar dari rumah," pesan dia. **(hul)**

Sumber berita:

1. www.prokal.co, Pemerintah Siapkan Uang Sewa dan Bantuan Perbaikan Rumah, 06/01/24
2. kaltim.tribunnews.com, Pemkot Bantu Sewa Rumah untuk Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Perumahan Polda Km 7 Balikpapan, 12/01/24

Catatan:

1. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah menyatakan bahwa, untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah

bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Perwali Balikpapan 21/2021) diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Bansos kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
3. Berdasarkan Pasal 20 Perwali Balikpapan 21/2021, individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana alam, atau fenomena alam yang jika tidak diberikan Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.